PEMBERDAYAAN SEBAGAI ALTERNATIF PENDEKATAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ade Kosasih*, Kunto Sofianto, Widyo Nugrahanto dan Ayu Septiani

Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: a.kosasih@unpad.ac.id

ABSTRAK. Pengabdian kepada masyarakat adalah tanggung jawab para akademisi. Dalam pelaksanaannya, pengabdian yang ideal adalah berupa pemberdayaan (*empowering*), sehingga masyarakat akan memiliki kekuatan setelah tidak didampingi lagi oleh akademisi. Dalam pemberdayaan, upaya yang harus dibangkitkan adalah partisipasi, masyarakat menjadi pusat kegiatan, serta menciptakan kemandirian. Artikel ini bertujuan mengungkapkan pandangan konseptual tentang pemberdayaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tidak terjadi pelaksanaan pengabdian yang tidak tepat konsep dan pelaksanaannya. Pengungkapan maksud tersebut dilakukan dengan cara memaparkan konsep dasar dalam pemberdayaan yang bercirikan tiga hal tersebut, yaitu partisipasi, berbasis masyarakat, dan mewujudkan kemandirian. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara menggali secara cermat berbagai pandangan tentang pemberdayaan dalam berbagai publikasi ilmiah. Untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, pemberdayaanlah yang tepat karena masyarakat itu sendiri banyak terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksana pengabdian hanya berperan sebagai fasilitator yang menghindari kecenderungan melakukan intervensi. Partisipasi merupakan bentuk peran serta khalayak secara sukarela tanpa mobilisasi dan tekanan. Berbasis masyarakat berarti seluruh tindakan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi karena setiap masyarakat mempunyai potensi dan masalah yang berbeda-beda. Kemandirian merupakan wujud bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melaksanakan harapan dan cita-citanya tanpa terus didampingi oleh fasilitator.

Kata kunci: Pengabdian; Pemberdayaan; Partisipasi, Berbasis masyarakat; Kemandirian

ABSTRACT. Society service is the responsibility of academics. In its implementation, the ideal service is empowerment so that the community will have strength after no longer being accompanied by academics. In empowerment, the efforts that must be aroused are participation, the community becoming the center of activities, and creating independence. This article aims to express conceptual views on empowerment in community service activities so that no implementation of service is appropriate in concept and implementation. This intention is disclosed by explaining the basic idea of empowerment, which is characterized by participation, community-based, and realizing independence. The method used is the descriptive analysis by carefully exploring various views on empowerment in various scientific publications. Empowerment is appropriate for creating a harmonious society because the community is heavily involved in the planning, implementation, monitoring, and evaluation. The service implementer only acts as a facilitator who avoids the tendency to intervene. Participation is a form of voluntary audience participation without mobilization and pressure. Community-based means that all actions must be adjusted to conditions and situations because each community has different potentials and problems. Independence is a manifestation that the community can carry out its hopes and ideals without being continuously accompanied by a facilitator.

Keywords: Society Service; Empowerment; Participation, Community-based; Independence

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat (PPM) bukan hanya pelengkap kegiatan *tridarma* perguruan tinggi di samping pendidikan/pengajaran dan penelitian, tetapi merupakan program penciri dari suatu perguruan tinggi. Bahkan PPM dapat disebut sebagai etalase citra perguruan tinggi yang secara langsung dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Program PPM bertujuan, di antaranya, untuk (1) mengaplikasikan hasil riset di tengah-tengah masyarakat; (2) merealisasikan kepedulian dan empati terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat; (3) mendampingi masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam proses pembangunannya; (4) menginspirasi masyarakat untuk terus meningkatkan peran serta di dalam

pembangunan; dan (5) memberikan kontribusi positif kepada para pemangku kepentingan di dalam proses pembangunan. Secara filosofis, PPM merupakan wujud konkret dari penerapan ilmu (aksiologi) yang bersifat siklus atau umpan balik (*feedback*), sehingga “jika dilaksanakan dengan baik, benar, sistematis dan konsisten (sesuai peta jalan dan rencana strategis)”, maka hasilnya bukan hanya memberdayakan dan memandirikan masyarakat serta menguatkan daya saing bangsa, tetapi akan semakin membangun dan menguatkan pendidikan dan penelitian. PPM sangat potensial dilakukan dalam satu bidang ilmu (*monodisiplin*), antar bidang ilmu serumpun (*interdisiplin*), ragam bidang ilmu terkait (*multidisiplin*) dan antar bidang ilmu yang berlainan (*transdisiplin*), sehingga dapat mengintegrasikan dan menyinergikan seluruh

potensi institusi dalam ikatan (*bonding*) kerja sama inter dan antar pelaku keilmuan. Secara praktis, PPM bersifat umum, artinya dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai ruang dan masyarakat (baik di perkotaan, di pinggiran perkotaan maupun di pedesaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri), dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait (mitra atau *stakeholders*), serta dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa.

PPM dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi serta kondisi sosial budaya masyarakat khalayak Sasarannya. Adapun hasil PPM dapat digunakan dalam proses pengembangan ipteks, inovasi pembelajaran, dan melahirkan teknologi tepat guna (*UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi*, 2012). Oleh sebab itu, pelaksanaan PPM di berbagai universitas di Indonesia mungkin ada sedikit perbedaan dalam struktur pelaksanaannya. Universitas Padjadjaran (Unpad) mengembangkan PPM berbasis riset, yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran kepada masyarakat desa atau kota dan masyarakat industri dengan metode riset yang model pencapaian tujuannya mengandalkan satu pendekatan dan metodologi tertentu. Program ini merupakan hilirisasi hasil riset atau diseminasi metode yang dilakukan oleh dosen dalam mempertajam dan memperkaya model pengabdian pada masyarakat. PPM berbasis riset dapat diinisiasi oleh kelompok dosen dari berbagai disiplin ilmu maupun dari satu rumpun ilmu tertentu. Untuk memperkaya atau memperkuat teori pemberdayaan tersebut, maka kegiatan PPM berbasis Riset ini dilakukan dalam bentuk pendampingan, dan atau advokasi. *Participatory Actions Research* (PAR) dan *Community Base Research* (CBR) merupakan metode yang disarankan untuk PPM berbasis Riset (DRPM & Direktorat Inovasi dan Korporasi Unpad, 2023).

Program PPM merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di perguruan tinggi. Hal itu terbukti dari regulasi yang ada. Sebagai program yang memanfaatkan ipteks untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, PPM memerlukan topangan metodologis dan pendekatan yang relevan pada pelaksanaannya (Muniarty et al., 2021). Metode dan pendekatan yang relevan ini sangat dibutuhkan karena kondisi masyarakat sebagai khalayak sasaran memiliki keragaman sesuai dengan lokasi, potensi, dan masalahnya masing-masing. Ada banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam program PPM. Secara garis besarnya, pendekatan-pendekatan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan dan pemberdayaan. Dua pendekatan

itulah yang sering digunakan dalam upaya memajukan masyarakat, baik oleh instansi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat. Sejatinya PPM itu merupakan ikhtiar menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup oleh mereka sendiri, bukan program yang dilaksanakan hanya *lip service*. PPM seharusnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terencana dengan baik, bermanfaat, dan berdampak.

Artikel ini merupakan hasil pemikiran sebagai dasar untuk pelaksanaan PPM yang bermanfaat dan berdampak kepada kemajuan masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal itu, masyarakat sendiri sebagai subyek dari PPM itu. Sedangkan sivitas akademika hanya sebagai fasilitator saja.

METODE

Artikel ini merupakan konsepsi alternatif yang dapat digunakan oleh para pelaksana PPM. Adapun konsepsi ini didapatkan dari hasil bacaan terhadap beberapa sumber, terutama regulasi pemerintah dan Universitas Padjadjaran serta pengalaman pelaksanaan PPM dari tahun ke tahun. Hal itu dimaksudkan agar program PPM dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga dampak dan manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai mitra.

Penulisan artikel ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan secara deskriptif dalam pelaksanaan program PPM. Maka “pemberdayaan” akan diuraikan secara konseptual dan filosofis sebagai sebuah pendekatan untuk membangun kemajuan masyarakat. Setelah konsep pemberdayaan diungkapkan, tawaran alternatif pelaksanaan juga dideskripsikan agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata “pemberdayaan” merupakan padanan kata “*empowerment*” dalam Bahasa Inggris. Kata “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang berarti (1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; (2) kekuatan; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya); (3) muslihat; (4) akal, ikhtiar, dan upaya; serta (5) kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu yang minimal. Pemberdayaan merupakan suatu proses atau cara, atau pun juga sebagai suatu perbuatan untuk menuju berdaya. Pengertian

proses tadi merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat dilakukan secara sistematis dan bertahap. Serangkaian tindakan ini tentunya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan atau kemandirian.

Program pemberdayaan merupakan ikhtiar untuk membangun masyarakat agar memiliki kekuatan untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan juga memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Minarni et al., 2017). Oleh sebab itu suatu program pemberdayaan, setidaknya-tidaknya, memiliki ciri terbangunnya partisipasi khalayak sasaran, pelaksanaannya berbasis masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian.

1. Partisipasi

Kata “partisipasi” berarti ‘berperan serta’ dalam suatu kegiatan; ‘keikutsertaan’; dan ‘peran serta’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dari pengertian itu dapat dimaksudkan bahwa partisipasi mensyaratkan terbangunnya peran serta masyarakat atas dorongan sendiri dan tanpa paksaan. Pembangunan dengan basis partisipasi dapat dikategorikan sebagai pembangunan yang efektif dan efisien (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020).

Pemberdayaan yang tepat dicirikan oleh aktivitas yang bersifat partisipasi dari masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dan harapan meraih kemajuan yang sempurna dalam kehidupan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development*. Dalam konteks ini, masyarakat tidak berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan strategi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. Proses pemberdayaan ini mencerminkan keterlibatan individu dan kelompok dalam mengambil inisiatif, merencanakan, serta melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Dengan adanya partisipasi aktif, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kapasitasnya, memperkuat kemandirian, serta memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tantangan zaman, terutama, dalam bidang sosial dan ekonomi. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan setiap individu memiliki kesempatan

dan peluang yang sama dalam mengakses informasi serta sumber daya, baik dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Cita-cita pembangunan, dalam paradigma partisipasi, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan saja, tetapi akan meliputi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam meraih kemajuan yang ideal, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi dalam mewujudkan hidup serta kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi merupakan ciri yang harus mewarnai program pembangunan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang baik (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020). Tanpa partisipasi dari masyarakat, pembangunan akan mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap intervensi-intervensi dari luar.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu program pembangunan agar pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Hal itu terjadi karena partisipasi melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan konstruktif dalam setiap tahapan program, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Lebih jauh lagi, partisipasi akan melibatkan mental, moral, dan emosional agar terwujud kohesifitas semua pemangku kepentingan terlebih khalayak sasaran.

Dalam pendekatan partisipatif, aktifis pemberdayaan merupakan fasilitator; sedangkan khalayak sasaran sebagai subyek yang memiliki harapan untuk meningkatkan kapasitasnya. Dalam hal itu tidak ada *superior* dan *imperial* karena yang terjadi adalah kesetaraan dan kemitraan. Mitra dapat memberikan ide, gagasan, dan pandangannya yang setara dalam seluruh tahapan pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki.

Dalam Al-Quran, terdapat perintah saling tolong-menolong untuk melakukan kebaikan seperti pada Al-Quran Surat Al-Maidah (Surat Kelima) Ayat 2, seperti berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

[wa ta‘âwanû ‘alal-birri wat-taqwâ wa lâ ta‘âwanû ‘alal-itsmi wal-‘udwâni wattaqullâh]

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (*Al-Maidah Ayat 2*, n.d.).

Tolong-menolong merupakan bentuk partisipasi

karena setiap berperan serta dalam kehidupan untuk mewujudkan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Demikian juga dengan adanya interaksi sosial yang terungkap dalam Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 (Hamzah & Fajar, 2020).

Berbagai hal yang menyangkut partisipasi masyarakat menyerap aspirasi dari masyarakat bawah *button-up* bukan merupakan *top-down* (Abdul Rahmat & Mira Mirnawati, 2020).

Gambar 1. Partisipasi Individu Dalam Proses Pemberdayaan

2. Berbasis Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan (Endah, 2020). Masyarakat sebagai sasaran kegiatan pengabdian bukan hanya berperan sebagai pelengkap, tetap harus merupakan basis utama. Masyarakatlah yang akan diberdayakan dengan cara masyarakat itu sendiri yang mengetahui potensi, masalah, dan harapannya masing-masing. Masyarakatlah yang harus menemukan diri mereka sendiri dalam berbagai segi kehidupannya.

Kegiatan pengabdian berbasis masyarakat diwujudkan dengan kesadaran akan jati diri masyarakat itu sendiri terkait potensi, sehingga akan terjadi transformasi kekuatan untuk mengembangkannya dalam meraih harapan yang dicita-citakannya. Maka akan terjadi juga kemampuan dan potensi intelektualnya (Istiyanti, 2020).

Pemberdayaan dengan menekankan pada masyarakat atau berbasis masyarakat merupakan langkah yang strategis untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat tersebut seperti bidang pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kreatif (Saepudin et al., 2022). Hal itu akan tercipta suasana keakraban tanpa *barrier*

(Kamaluddin, 2016). Dalam kegiatannya akan mewujudkan suasana yang menyenangkan karena terjadi interaksi langsung. Masyarakat dijadikan sebagai pusat kegiatan tanpa adanya sekat yang menghalanginya untuk saling bertukar pandangan, menggali ide dan gagasan, serta mengungkapkan potensi dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat tanpa terhalang oleh peran masing-masing. Suasana seperti itu akan mewujudkan pembangunan masyarakat yang efektif. Banyak program pengabdian yang tidak berdampak karena pendekatannya selalu masyarakat sebagai objek.

Gambar 2. Suasana Ppm Berbasis Masyarakat

3. Kemandirian

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Cholisin, 2011). Kemandirian merupakan tahapan terakhir sebagai hasil yang harus diwujudkan dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian yang dilakukan. Untuk menciptakan kemandirian dibutuhkan tahapan sebelumnya berupa kesadaran, transformasi pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan pengetahuan yang memadai (Lukman, 2021). Kemandirian akan terwujud dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menginisiasi ide dan gagasan, memutuskan cara dan metode yang tepat dalam mengelola sumber daya yang ada melalui tindakan kolektif dan membangun jaringan (Lukman, 2021). Kemampuan masyarakat untuk mengubah dan meningkatkan kapasitas yang mereka peroleh dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari tahap kemandirian (Lukman, 2021).

Pelibatan masyarakat secara menyeluruh dalam semua tahapan pembangunan akan menciptakan kemandirian karena secara sadar masyarakat mengetahui potensi besar yang dimilikinya (Hermawan et

al., 2021). Kemandirian tidak akan tercapai dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat apabila tidak dilakukan pemberdayaan bahkan akan menciptakan ketergantungan yang akut di masyarakat (Saleh & Sihite, 2020). Kemandirian akan menciptakan dan memastikan masyarakat untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan potensi dan kekuatan sendiri. Apabila hal itu terjadi, maka pemangku kepentingan akan memiliki kemudahan dalam membangun masyarakat. Masyarakat disebut sejahtera manakala masyarakat secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk memperoleh kehidupan yang layak serta memiliki kemampuan secara mandiri mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan penuh percaya diri (Saeful & Sri Ramdhayanti, 2020). Kemandirian itulah sejatinya yang akan diraih masyarakat apabila pembangunan yang diprogramkan menggunakan pendekatan pemberdayaan. Hal itu terjadi karena pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi dalam mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Istiyanti, 2020).

Gambar 3. Pohon Cita-Cita Dalam Mewujudkan Kemandirian

Dalam ajaran Agama Islam, kemandirian merupakan kemampuan seseorang atau masyarakat untuk mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain (Al-Quran, n.d.). Demikian juga dengan seseorang itu bertanggung jawab atas sesuatu yang diperbuatnya (Al-Quran, n.d.).

SIMPULAN

Program Pengabdian merupakan salah satu dari tiga darma perguruan tinggi. Oleh sebab itu seorang

akademisi pasti melaksanakannya di samping program pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Dalam pelaksanaannya, program pengabdian itu menggunakan berbagai macam pendekatan dan cara. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pemberdayaan dengan maksud akan khalayak sasaran dapat mewujudkan ciri partisipasi, berbasis masyarakat, dan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang tepat untuk membangun potensi masyarakat dalam mengatasi permasalahannya sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran sebagai harapan hidupnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini terlaksana berkat bantuan dan dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Kepala Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.
2. Manajer Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat, & Mira Mirnawati. (2020). MODEL PARTICIPATION ACTION RESEARCH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71. <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Al-Maidah Ayat 2. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>
- Al-Quran. (n.d.). *Surat Al-Isra Ayat 84*. <https://quran.nu.or.id/al-isra'/84>
- Hamzah, H., & Fajar, A. (2020). Konsep Interaksi Sosial Dalam Al-Qur'an. *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 1(2), 41–51. <https://doi.org/10.59622/jiat.v1i2.40>
- Hermawan, Y., Hidayatullah, S., Alviana, S., Hermin, D., & Rachmadian, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Wisata Edukasi dan Dampak yang Didapatkan Masyarakat Desa Pujonkidul. *Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.53754/edusia.v1i1.21>
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat

- Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Januari, 2020*(1), 53–62.
- Kamaluddin. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Alokasi Dana Desa Di Desa Wilamaci Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan, III*(1), 41–54. <https://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/issue/view/13>
- Lukman, A. I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan Nonformal di PKBM Tiara Dezzy Samarinda. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5*(2), 180–190. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i2.43669>
- Saeful, A., & Sri Ramdhayanti. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Syar'ie, 3*. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Saepudin, E., Budino, A., & Halimah, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. In *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* (Vol. 11, Issue 3).
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi, 4*(1), 98–105. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.4134>